

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
UNIT KERJA : KECAMATAN GONDANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DARMANTONO**
2. Jabatan : **CAMAT GONDANG**
3. NHK : **868249**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **63.000.000**

1. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI
Rp. 63.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **26.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA 25V Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000
2. MOTOR, HONDA C100 / SPM SOLO Tahun 1995, HASIL SENDIRI
Rp. 500.000
3. MOTOR, YAMAHA B6H-AI/A/T / SPM SOLO Tahun 2021, HASIL
SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOTOR, HONDA NC 11B1CA/T / SPOLOM S Tahun 2008, HASIL
SENDIRI Rp. 4.000.000
5. MOTOR, KAWASAKI KAZE R Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **3.500.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **17.000.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **110.000.000**

III. HUTANG Rp. **25.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **85.000.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.